

**LAPORAN HASIL PERTEMUAN THE 9TH MEETING OF THE CONFERENCE
OF THE CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY
BONN, JERMAN 2008**

I. PENDAHULUAN

Sidang ke-9 Conference of the Parties (COP) diselenggarakan di Hotel Maritim, Bonn Jerman pada tanggal 19-30 Mei 2008.

Dihadiri sekitar 4000 peserta dari unsur pemerintah, swasta, para pakar, wakil organisasi internasional, praktisi, wakil masyarakat serta LSM, dengan tujuan untuk mewujudkan kesepakatan atas target biodiversisty 2010: yakni mendorong upaya bersama bagi pengurangan hilangnya keanekaragaman hayati yang nyata hingga tahun 2010, khususnya dalam dukungan pengurangan kemiskinan sesuai dengan tujuan pembangunan millenium.

Delegasi Indonesia terdiri dari unsur Pemerintah (Departemen Kehutanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, LIPI) dan LSM (TNC, WWF, Kehati) dengan Ketua Delri Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Delegasi Departemen Kehutanan terdiri dari: Ir. Darori MM (Dirjen PHKA), Dr. Ir. Tonny Soehartono (Dir KKH), Ir. Noor Hidayat, M.Sc. (Dir KK), Dr. Samedi (Kasubdit KPA&TB) dan Drh. Indra Exploitasia (Kasie Non-CITES Dit. KKH).

COP-9 CBD dibuka secara resmi oleh Ambassador Raymundo Rocha Magno dari Brazil mewakili Presiden COP-8 pada tanggal 19 Mei 2008. Pertemuan telah memilih Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Sigmar Gabriel sebagai Presiden COP-9 dan Mary Fosi sebagai Rapporteur.

Sidang COP9 membahas topik prioritas:

- *Agricultural biodiversity*
- *Global strategy for plant conservation*
- *Invasive alien species*
- *Forest biodiversity*
- *Incentive measures,*
- *Ecosystem approach*
- Protected Areas
- *Progress in the implementation of the strategic plan and progress towards the 2010 target and relevant Millennium Development Goals (MDGs)*
- *Financial Resources and the Financial Mechanism.*

II. Hasil pertemuan

1. Pertemuan membentuk 2 working group, masing-masing diketuai Maria Mbengashe (Afsel) sebagai chair dari working group I serta Chweewan Hutacharem (Thailand) chair working group 2. WG 1 membahas isu-isu antara lain Global Strategy for Plant Conservation, Island biodiversity Forest biodiversity, Biodiversity and change, Global taxonomy initiative, Biodiversity of Marine and Coastal Area, Agriculture biodiversity (including biofuels),

Incentive measures, Invasive alien species dan Protected areas. Sedangkan WG 2 membahas isu-isu Progress in the implementation of the Strategic Plan and towards the 2010 target and relevant Millennium Development, Goals Article 8 (j) and related provisions, Access and Benefit-Sharing, Financial Resources and Financial Mechanism

2. Pembahasan di kedua working group diisi dengan penyampaian pandangan umum Negara pihak, organisasi internasional, NGO yang kemudian disarikan oleh Chair wg menjadi rancangan keputusan COP-9 dan pembentukan contact group dan mekanisme friends of the chair. Contact groups dan friends of the chair adalah untuk isu ABS, agriculture biodiversity, forest biodiversity dan article 8 (j) and related provisions, financial mechanism.
3. Hasil sidang secara keseluruhan mengadopsi dan "Bonn Roadmap" yaitu negosiasi internasional rejim tentang access and benefit-sharing (ABS); adopsi kriteria ilmiah dan pedoman untuk kawasan perairan yang membutuhkan perlindungan; 37 keputusan termasuk adopsi strategi mobilisasi sumber pendanaan, keputusan biodiversity and climate change, forest biodiversity, protected areas, dan kesepakatan tentang biofuels kecuali adopsi criteria berkelanjutan produksi dan konsumsi biofuel.

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC).

Pembahasan didasarkan pada rekomendasi SBSTTA-13 tentang kajian GSPC. Negara berkembang umumnya menggarisbawahi pentingnya dukungan pendanaan dan teknis dalam pengembangan strategi tersebut.

Delri menyampaikan bahwa GSPC memiliki arti penting sebagai kerangka kerja untuk harmonisasi berbagai inisiatif dan program dalam konservasi tanaman di tingkat nasional maupun regional. Delri juga menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang selaras dengan GSPC.

Agriculture biodiversity.

Pembahasan isu ini didasarkan draft decision mengenai programme kerja agriculture biodiversity, rekomendasi SBSTTA-13 dan laporan Sekretaris Eksekutif mengenai dampak biofuel terhadap keanekaragaman hayati. Terkait dengan program kerja, delegasi umumnya menyambut baik dan mendorong peningkatan kerjasama dengan FAO. Pembahasan terfokus pada isu biofuel yang diwarnai oleh berbagai intervensi terutama oleh negara-negara berkembang.

EU menekankan pentingnya produksi biofuel yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengusulkan pembentukan Ad-hoc technical expert group (AHTEG) untuk mengembangkan pedoman (guidelines) bagi produksi biofuel. Sedangkan kelompok negara-negara Arab mengkaitkan biofuel dengan food security. Brazil telah menyampaikan pentingnya kontribusi produksi biofuel bagi pembangunan berkelanjutan, keamanan energi dan ketahanan pangan serta pencapaian tujuan MDGs. Parties pada prinsipnya menyadari perlunya upaya untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari produksi dan konsumsi biofuel.

Delri dalam intervensinya telah menyampaikan dukungannya terhadap program kerja agriculture biodiversity dan pembentukan AHTEG untuk mengkaji dampak biofuel terhadap keanekaragaman hayati pertanian serta upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan konservasi agriculture biodiversity. Terkait dengan isu agriculture biodiversity dan biofuel Delri menyampaikan berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan produksi biofuel secara berkelanjutan.

Isu lainnya adalah ruang lingkup program kerja agricultural biodiversity, dimana EU mengusulkan interlinkages antara program kerja agriculture biodiversity dan forest biodiversity. EU mengusulkan agar isu biofuel diperluas hingga mencakup isu bioenergy dan biomass production. EU juga mengusulkan untuk membentuk Ad-hoc Technical Expert Group guna mengkaji isu biofuel dan memfasilitasi pembentukan draft awal dari guidelines for biofuel. Dalam paket usulan dari EU ini, juga diusulkan untuk meneruskan isu biofuel ke SBSTTA dan COP 10. Usulan ini kembali didukung oleh kelompok negara Afrika. Serta ditentang oleh Brazil. Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut Presiden COP-9 menunjuk Menteri Lingkungan Swedia dan Duta Besar Brazil untuk membantu memimpin jalannya negosiasi. Namun sampai dengan hari ke 11 konferensi para pihak kedua isu tersebut belum dapat mencapai kesepakatan. Pada akhirnya disepakati "balance package" untuk mengatasi perbedaan tersebut. Kompromi tersebut adalah dengan menghilangkan penyusunan guidelines produksi dan penggunaan biofuel secara berkelanjutan, membatalkan pembentukan AHTEG yang semula direncanakan untuk menyusun guideline dan memisahkan isu biofuel menjadi dokumen tersendiri namun masih dalam kerangka isu agriculture biodiversity.

Forest Biodiversity.

Pembahasan didasarkan pada rekomendasi SBSTTA-13 mengenai Ad-hoc Technical Expert Group (AHTEG) untuk mengkaji implementasi program kerja forest biodiversity. Beberapa negara berkembang menekankan pentingnya dukungan capacity building dari negara-negara maju untuk implementasi program kerja forest biodiversity. Beberapa isu penting dalam pembahasan forest biodiversity antara lain penyediaan dana-nana baru dan tambahan (new and additional) untuk pembiayaan program of works mengenai forest biodiversity.

Dalam intervensinya, Delri menekankan pentingnya forest governance dan penegakan hukum dalam melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati hutan. Selain itu Delri juga menyampaikan pentingnya penguatan kerjasama antara berbagai organisasi internasional termasuk inisiatif-inisiatif di tingkat regional terutama dalam rangka sistem rantai perdagangan (chain custody system) untuk mencegah tindakan-tindakan illegal termasuk terkait perdagangan keanekaragaman hayati hutan.

Pada akhir sidang, untuk *forest biodiversity*, telah dicapai kesepakatan yang menjadi usulan Indonesia yaitu mencantumkan *chain-custody system* yang terkait dengan issue penegakan hukum tindakan-tindakan illegal dan perdagangan keanekaragaman hayati hutan (termasuk sumberdaya kayu dan hidupan liar) kedalam draft keputusan yang pada awalnya mendapat tentangan dari Malaysia dan Brazil. Terkait dengan isu *governance* sidang telah menyepakati agar Negara anggota melaksanakan *sustainable forest management* melalui system perijinan dan *voluntary certification*. Selain hal tersebut, juga dicapai kesepakatan mengenai *genetic modified trees* (gmt) dimana Indonesia mengusulkan agar pelepasan gmt mengikuti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan sidang memutuskan agar gmt dapat dilepas setelah dilakukan studi kajian resiko (*risk assessment*) dengan melakukan penelitian terlebih dahulu pada tempat tertutup sehingga tidak dimungkinkan terjadinya dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati hutan, termasuk terjadinya *cross-pollination* dari gmt ke jenis-jenis setempat. Negara pihak juga diminta untuk mengembangkan pengetahuan dan tools pembayaran jasa lingkungan (PES) serta menangani dampak negatif dari penggunaan langsung maupun tidak langsung penggunaan biomass terutama oleh industri skala besar.

Incentive Measures.

Pembahasan isu ini berdasarkan pada review program kerja dalam rekomendasi SBSTTA-13.

Delri menyampaikan bahwa Indonesia telah melaksanakan pemberian insentif baik berupa financial (*monetary*) maupun penghargaan (*non monetary*) pada sektor lingkungan hidup, kehutanan, pertanian dan perikanan. Delri juga meminta Eksekutif Sekretaris untuk melakukan kajian mengenai upaya-upaya pemberian insentif yang telah diterapkan di berbagai negara serta mendukung adanya Terms of Reference (TOR) tentang cara monitoring yang dapat mendukung implementasi perangkat valuasi dan *incentive measures* yang positif yang telah disediakan oleh Sekretariat CBD.

Protected Area

Pembahasan isu ini utamanya terkait dengan pendanaan (new and additional) untuk membiayai program kerja protected areas. Negara-negara berkembang meminta negara-negara maju untuk menambah pendanaan (new and additional) untuk pembiayaan program kerja tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, negara pihak diminta untuk mencari peluang pendanaan untuk efektifitas pengelolaan PA dalam upaya mengatasi perubahan iklim termasuk mitigasi dan adaptasi.

Isu lainnya terkait dengan usulan NGO "Indigenous forum" yang mengusulkan agar dalam melaksanakan konservasi dan pengembangan kegiatan dari protected areas, selain harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional juga harus sesuai dengan hukum kebiasaan "customary law". Delri mengajukan keberatan dan menyampaikan bahwa Indonesia tidak mempunyai hukum kebiasaan yang tertulis. Banyaknya masyarakat adat di Indonesia juga akan menyulitkan untuk menentukan hukum kebiasaan mana yang akan berlaku. Keberatan Delri didukung oleh Brazil, Selandia Baru dan Kanada. Pada pembahasan berikutnya disepakati kalimat dalam paragraf menjadi "where applicable taking into account indigenous and local communities' own management systems and customary use".

Selain itu, telah disepakati agar Negara-negara anggota melakukan analisis gap keterwakilan ekologis (*ecological gap analysis*) kawasan konservasi sebelum tahun 2009, dan dihimbau untuk menetapkan kawasan-kawasan konservasi baru dari hasil analisis gap tersebut. Mengenai pembiayaan terhadap penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, beberapa Negara maju yang tergabung dalam G8 masih keberatan terhadap teks yang mengundang Negara maju menyiapkan dana tambahan baru untuk biaya penetapan kawasan konservasi baru dan pengelolaan efektif kawasan konservasi. Selain itu Negara-negara anggota didesak untuk melaksanakan *program of work on protected areas* (program kerja) secara konsisten agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Invasive Alien Species (IAS)

Dasar pembahasan isu ini adalah rekomendasi SBSTTA-13 mengenai "In-depth review of Invasive Alien Species (IAS) yang disiapkan Sekretaris Eksekutif. Negara-negara pihak menyampaikan beberapa hal penting terkait penanggulangan penyebaran IAS, antara lain akses informasi dan pertukaran informasi serta capacity building.

Delri menyampaikan pandangan mengenai dibutuhkannya peningkatan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara pihak, Sekretariat CBD dan organisasi internasional lainnya terutama FAO untuk mengatasi isu IAS. Delri juga mengusulkan adanya kerjasama peningkatan kapasitas dan bantuan teknik terutama dalam hal identifikasi *invasive alien species*. Terkait dengan isu import risk assessment, Delri menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan keadaan dari suatu negara dalam menyusun *import risk assessment* terutama untuk spesies-spesies yang diperdagangkan.

Biodiversity in marine and coastal areas

Pembahasan isu ini didasari pada rekomendasi SBSTTA -13 mengenai *Options for preventing and mitigating the impacts of some activities to selected seabed habitats, and scientific and ecological criteria for marine areas in need of protection and biogeographic classification systems*.

Dalam kesempatan ini, Delri menekankan pentingnya untuk mengacu pada UNCLOS 1982 dalam pembahasan isu konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dalam konteks marine and coastal areas. Delri juga mendukung adanya kerjasama internasional dan regional dalam rangka konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas wilayah-wilayah laut yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional serta menekankan pentingnya kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas dan bantuan teknik.

Dalam pembahasan mengenai implementasi dari annex I, II dan III dari draft decision mengenai kriteria-kriteria untuk menentukan wilayah laut yang membutuhkan perlindungan di open ocean water and deep-sea habitat, Brazil menyampaikan keberatannya untuk membuat jaringan marine protected areas (MPAs) di luar wilayah yurisdiksi negara. Sebagai kompromi disepakati bahwa hasil kerjasama pembentukan jaringan MPAs di luar wilayah yurisdiksi negara akan dikonsultasikan kepada Majelis Umum PBB untuk membantu membuat keputusan terkait hal tersebut.

Isu lainnya adalah mengenai pembentukan expert workshop dalam lingkup regional, sektoral, dan organisasi internasional terkait yang akan membahas mengenai hasil-hasil "best practices". Expert workshop ini akan menghasilkan suatu rekomendasi kepada SBSTTA. Keberatan mengenai hal tersebut datang dari Iceland yang menginginkan pembentukan expert workshop hanya pada lingkup regional. Kesepakatan yang dapat dicapai adalah menambahkan kalimat pada akhir paragraf yang pada intinya bahwa expert workshop ini tidak akan membahas mengenai pengelolaan dari MPAs.

Terkait permasalahan definisi "open ocean waters and deep-sea habitat" Delri telah mengajukan usulan untuk membuat footnote yang dapat dijadikan referensi. Usulan Delri tersebut dapat diterima langsung oleh chairperson working group dan semua negara pihak.

Biodiversity and Climate Change

Pembahasan berdasarkan pada rekomendasi SBSTTA- 13 terkait sinergi ketiga konvensi Rio, yaitu CBD, UNFCCC dan UNCCD. Pada umumnya negara pihak mendukung adanya sinergi antara ketiga Konvensi Rio. Isu lainnya yang mengemuka adalah isu ocean fertilization. Beberapa negara pihak menyampaikan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) terhadap *ocean fertilization*. Sedangkan beberapa negara berkembang meminta moratorium *ocean fertilization*.

Access and Benefit Sharing

Isu ABS merupakan salah satu isu utama, yang dibahas pada Access dan benefit sharing mencakup rencana proses pembahasan international regime on access and benefit sharing (ABS) sampai dengan COP 10 CBD tahun 2010; Pembiayaan untuk mendukung proses pembahasan international regime on ABS; Basis negosiasi international regime on ABS yang akan mengacu pada hasil working group on access and benefit sharing ke-6 di Jenewa, Januari 2008; serta isu substansi dari international regime on ABS. Pembahasan mengacu pada mandat Presiden COP-9 yang menekankan bahwa COP 9 CBD harus dapat menghasilkan prosedur dan mandat yang jelas dari penyelesaian pembahasan internasional regime on Access and Benefit Sharing.

Articel 8 (j) and related provisions

Sebagian Negara pihak menekankan perlunya kerjasama antara Ad Hoc Open Ended Working Group on Artikel 8 (j) dan Ad Hoc Open Ended Working Group on ABS dan kedua pertemuan tersebut dapat dilakukan secara back to back. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas beberapa isu penting, yaitu Composite report on status dan trends regarding traditional knowledge terkait dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pedoman untuk dokumentasi pengetahuan tradisional serta mekanisme partisipasi indigenous dan local communities dalam proses konvensi.

Dalam intervensinya, Delri menekankan bahwa Sekretariat CBD perlu memfasilitasi Working group on Traditotional Knowledge (TK) untuk melakukan identifikasi ancaman terhadap hak pemilik pengetahuan tradisional dari dokumentasi TK dan mengusulkan perlu adanya kerjasama dengan organisasi internasional terkait lainnya, seperti WIPO. Selain itu, delri juga menyampaikan bahwa dalam pengembangan sui generis system di tingkat lokal, nasional atau regional perlu memperhatikan hak masyarakat lokal atas pemanfaatan pengetahuan tradisional yang mereka miliki, khususnya yang terkait dengan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual.

III. Side Events

A. Pelaksanaan *side event* Heart of Borneo (HoB), 27 Mei 2008

- Tiga negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia didukung oleh Pemerintah Jerman sebagai negara penyelenggara COP telah berhasil menyelenggarakan *side event* berjudul "*Heart of Borneo: Bridging Conservation and Sustainable Development*".
- Pada Side Event HoB dalam COP-9 CBD tersebut, panel dipimpin oleh Mr. Rudolf Specht dari Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi dan Keamanan Nuklir/BMU, Jerman. Side event diawali dengan kata pengantar dari Executive Secretary CBD, Mr. Ahmed Djoghlaif. Dalam kata pengantarnya, Ahmed Djoghlaif menyambut baik inisiatif HoB dan mengharapkan agar inisiatif ini menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam membangun kerjasama lintas batas untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan lestari keanekaragaman hayati. Ahmed Djoghlaif juga menyampaikan selamat kepada Brunei Darussalam sebagai Negara termuda anggota CBD, serta mengingatkan bahwa Indonesia merupakan tuan rumah COP-2 CBD dan Malaysia tuan rumah COP-7 CBD. Oleh sebab itu ketiga Negara merupakan Negara yang sangat penting dalam pelaksanaan konvensi CBD. Sambutan dari Jochen Flasbarth, Direktur Jenderal Nature Conservation and Sustainable Use of Nature, BMU, sangat mendukung inisiatif 3 negara dengan program HoB yang telah disepakati. Saat ini Pemerintah Jerman mempunyai program bantuan untuk mendukung kegiatan HoB yang sangat terkait dan mendukung dengan program kerja CBD.
- Para wakil pemerintah 3 negara kemudian menyatakan bahwa tiap negara telah meraih manfaat atas peran besarnya dalam kerjasama mewujudkan pengelolaan kawasan seluas sekitar 200 juta hektar tersebut. CBD COP-8 tahun 2006 di Curitiba, Brazil telah menjadi landasan penting bagi ketiga negara ini, yakni dengan peluncuran secara internasional komitmen bersama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, melindungi sumber-sumber daya alam penting dan menurunkan kemiskinan di Kalimantan. Program kerjasama lintas batas (HoB) dideklarasikan oleh tiga Menteri di Bali, Indonesia pada 2007. Setahun kemudian, rencana aksi tiga negara untuk mewujudkan tekad itu akhirnya menjadi nyata. Kemudian 3 negara menyampaikan kemajuan implementasi program HoB di masing-masing negara. Dalam hal ini Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Hj Saidin Salleh, Director of Forestry Director of Forestry, Ministry of Industry & Primary Resources

sedangkan dari Indonesia oleh Noor Hidayat, Direktur Konservasi Kawasan, Ministry of Forestry dan Malaysia oleh Letchumanan Ramatha, Under Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment.

- Acara diakhiri dengan komentar dari undangan, antara lain delegasi Perancis, Belanda, EU, perwakilan World Bank, ASEAN Centre Biodiversity, GRASP UNEP, WWF International, yang menyambut baik terhadap inisiatif HoB dan memberikan apresiasi kepada 3 negara untuk keberhasilannya mencapai kesepakatan terhadap program HoB 3 negara.

B. Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri (High Level Segment): 28 Mei 2008

- Topik yang dibahas meliputi: keanekaragaman hayati pangan dan pertanian; pembangunan dan pengentasan kemiskinan; *Access and Benefit Sharing* pemanfaatan keanekaragaman genetik (ABS); keanekaragaman hayati dan perubahan iklim serta bahan bakar bilogis (*biofuel*).
- Dalam kesempatan diatas, Ketua Delri menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perlunya dibentuk *informal consultative group on ABS*, untuk mencapai kesepakatan diadopsinya rejim internasional tentang ABS, yaitu apakah ABS akan membentuk rejim yang secara hukum mengikat seperti dibentuknya protokol atau rejim yang tidak mengikat, pada COP-10 mendatang. Selain hal tersebut, Indonesia juga menyampaikan tentang pentingnya menekan dampak negatif dari produksi biofuel dan konsumsi keanekaragaman hayati yang tidak lestari, sehingga Indonesia setuju apabila pengembangan biofuel harus melalui sistem sertifikasi.
- Terkait dengan isu Marine Protected Areas (MPA), Indonesia menyampaikan tentang Inisiatif Segitiga Korale (*Coral Triangle Initiative/CTI*). *Coral Triangle Initiative* yang melibatkan 6 negara (Malaysia, Filipina, PNG, Solomon Island, Timor Leste dan Indonesia), saat ini sedang mengembangkan Strategi Rencana Aksi 6 negara untuk konservasi dan pemanfaatan lestari keanekaragaman hayati di wilayah coral triangle yang kaya akan keanekaragaman hayati laut.

IV. Saran Tindak Lanjut

1. Terkait dengan isu biofuel, perlu dilakukan penegasan kembali terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian; serta surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000 kepada Gubernur/ Kepala Daerah perihal penghentian/penangguhan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan perkebunan. Penegasan dalam bentuk memberikan instruksi kembali kepada Gubernur/Kepala Daerah terutama untuk pembatasan pembukaan lahan untuk perkebunan termasuk untuk tujuan produksi biofuel. Hal ini diperlukan selain sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam upaya menekan laju kehilangan keanekaragaman hayati juga sebagai bentuk sinergitas keputusan CBD dengan kebijakan sektor kehutanan.
2. Mengenai forest biodiversity, isu *genetic modified trees* (gmt) perlu ditindaklanjuti dengan prinsip pendekatan kehati-hatian terkait dalam pelepasan bibit/benih pohon hasil rekayasa genetic serta penerapan FLEG (*forest law enforcement and governance*) berikut kebijakan *chain of custody system* serta *voluntary certification* untuk memperkuat pemberantasan pembalakan liar dan terkait perdagangannya.

3. Untuk isu Protected Areas, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selain melakukan gap analysis keterwakilan ekosistem sebelum 2009, perlu meningkatkan efektifitas pelaksanaan *program of work on protected areas* melalui pelaksanaan *National Action Plan on Protected Areas* (NAPPA) yang sedang dalam proses penyusunan, serta mensinergikan keputusan sidang dengan rencana strategis Ditjen PHKA. Selain itu agar Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan (Baplan) dapat mengkonsolidasikan *Program of Works Forest Biological Diversity dan Protected Areas* kedalam Rencana Strategis dan Program Departemen (sektor kehutanan) sehingga program dapat dilaksanakan di lapangan dan pelaksanaan komitmen internasional dapat berjalan di lapangan.
4. Selain hal di atas, juga perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan baru mengenai *innovative financing* seperti *environment tax*, *payment environmental services*, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai dana tambahan baru pembiayaan pengelolaan efektif kawasan konservasi dan implementasi *sustainable forest management*.
5. Mengusulkan agar semua kegiatan diatas dapat menjadi rencana kerja proses NFP (*National Forest Program*) sehingga kebijakan sektor kehutanan untuk mendukung implementasi CBD terintegrasi dengan baik serta dilaksanakan oleh para pihak yang terkait.

Jakarta, 3 Juni 2008

Tim Delegasi Indonesia

(Tim Departemen Kehutanan)

Sumber:

Dit. KKH, Ditjen PHKA